

Bab 1 Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial modern, tindakan saling membantu menjadi fondasi penting bagi keberlangsungan nilai-nilai kemanusiaan serta ciri utama hubungan sosial yang harmonis. Di tengah meningkatnya individualisme akibat modernisasi dan digitalisasi, perilaku memberi tanpa pamrih mencerminkan eksistensi nilai prososial yang tetap bertahan di masyarakat, bahkan telah menjadi bagian dari identitas budaya bangsa. Masyarakat Indonesia dikenal memiliki kecenderungan tinggi untuk membantu orang lain, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Bentuk dari perilaku prososial ini dapat beraneka ragam, mulai dari menyumbang, memperhatikan kesejahteraan orang lain dengan berbagai langkah kedermawanan, menolong, menyelamatkan orang lain tanpa diminta, sampai mengorbankan diri untuk orang lain. Hal ini tercermin dalam laporan filantropi internasional pada data laporan terbaru World Giving Index (2024) yang dirilis oleh Charities Aid Foundation, Indonesia mempertahankan posisinya selama tujuh tahun berturut-turut dan menduduki puncak peringkat pertama. Peningkatan skor ini diukur dari beberapa aspek, meliputi donasi uang, membantu orang yang tidak dikenal, dan keterlibatan dalam kegiatan kerelawanan. Bahkan, Indonesia menempati posisi utama dalam aspek penting yaitu donasi uang (90%), kerelawanan (65%), lalu aspek membantu orang tak dikenal (66%).

Salah satu bentuk perilaku memberi bantuan yang seringkali ditemukan pada masyarakat perkotaan adalah pemberian bantuan langsung kepada pekerja jalanan, seperti gelandangan, pengamen, pengemis, ataupun pekerja di sektor informal. Namun, mengingat masalah kesejahteraan sosial di Indonesia sangat kompleks, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial seringkali tidak tuntas dan tidak terpadu. Salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang krusial dan menimbulkan dampak negatif adalah eksistensi gelandangan dan pengemis. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sementara itu, pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain (Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Pasal 1 Nomor 24, 2019).

Anggriana & Dewi (2016) juga menjelaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial terus melakukan upaya dalam mengurangi eksistensi Gepeng (Gelandangan Pengemis).

Upaya tersebut dilakukan secara terprogram, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan yang tentunya membutuhkan sinergi bersama dengan pihak lain secara lintas fungsi maupun lintas sektoral. Menurut Setiawan et al. (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Gepeng secara substansi dapat diilhami sebagai wujud dari entitas kelompok masyarakat yang sangat rentan dari segi keadaan ekonomi/sub-marginal. Eksistensi Gepeng secara nyata tidak memiliki kapasitas untuk bersaing dengan kelompok formal yang diimplikasikan oleh kemampuan yang terbatas, level pendidikan yang tidak mencukupi, dan kapasitasnya yang kurang begitu menggembirakan. Bahkan mereka menjalankan aktivitas pekerjaan seadanya, tanpa memilah dan bersedia melakukan apapun yang dapat dikerjakan. Pada dasarnya, itu semua rela dikerjakan demi mempertahankan hidupnya dan memenuhi kebutuhan fisiologis sehari-harinya di tengah huru-hara kehidupan perkotaan. Suri (2017) menyebutkan keadaan di lapangan bahwa gelandangan dan pengemis memakai berbagai macam cara agar masyarakat berempati kepada mereka dan dengan sengaja memainkan emosional masyarakat dalam meminta-minta dengan mengulurkan tangan bahkan berani untuk berpura-pura cacat demi mendapatkan belas kasihan. Selain itu, hal yang meresahkan adalah tindakan pemaksaan di jalan raya, terkhusus di lampu merah.

Kota Bandung sebagai kota besar dengan karakter masyarakat yang beragam telah menunjukkan fenomena serupa. Di Kota Bandung, norma tersebut kerap termanifestasi dalam praktik donasi di jalanan kepada pekerja atau pengemis jalanan yang masih sering dijumpai di berbagai sudut kota. Hal ini menekankan kuatnya norma sosial mengenai praktik memberi baik dalam bentuk donasi uang, kerelawanan waktu, maupun pertolongan kepada orang asing yang menjadi modal sosial bagi masyarakat. Namun, di balik capaian tersebut, muncul dinamika sosial yang menunjukkan bahwa praktik prososial masyarakat tidak selalu berjalan searah dengan regulasi atau efektivitas sosialnya, yang menyebabkan terciptanya gesekan normatif antara dorongan prososial warga dan penegakan ketertiban. Aturan ini tertuang pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (2019) yang melarang pemberian bantuan kepada pekerja jalanan secara langsung. Di dalam regulasi tersebut menyebutkan bahwasanya setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagai pengamen, pengemis, gelandangan, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum. Regulasi ini juga melarang setiap individu untuk mengkoordinir pihak lain menjadi pengamen, pengemis, pedagang asongan, dan/atau pembersih kendaraan. Selain itu, masyarakat dilarang membeli barang dari pedagang asongan serta memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, pengemis, dan/atau pembersih kendaraan di jalan dan fasilitas umum.

Kelompok gelandangan, pengemis, dan pemulung termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). PMKS adalah seseorang, keluarga, atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar (Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat Pasal 1 Nomor 21, 2019).

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Sosial Kota Bandung (2025) dalam kurun waktu 2017 hingga 2024, jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada kelompok gelandangan, pengemis, pemulung, dan anak jalanan memperlihatkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2017, tercatat terdapat 42 gelandangan, 86 pengemis, 610 pemulung, dan 172 anak jalanan. Angka tersebut mengalami penurunan di tahun 2018, dengan jumlah gelandangan tercatat 28 orang, pengemis meningkat menjadi 293 orang, namun pemulung turun drastis menjadi hanya 2 orang, sedangkan anak jalanan sedikit menurun menjadi 152 orang. Peningkatan paling mencolok terjadi pada tahun 2019, adanya lonjakan jumlah pengemis mencapai 2.079, diikuti anak jalanan sebanyak 1.002 orang, pemulung 73 orang, dan gelandangan 148 orang. Data ini menggambarkan bahwa pada periode tersebut terjadi peningkatan signifikan aktivitas sosial jalanan. Setelahnya, jumlah PMKS cenderung menurun kembali, meskipun masih menunjukkan variasi. Pada tahun 2024, tercatat 96 gelandangan, 197 pengemis, 148 pemulung, dan 39 anak jalanan.

Terdapat 32 titik di Kota Bandung yang dikategorikan sebagai pusat operasi PMKS. Dari 32 titik tersebut, delapan lokasi dikategorikan sebagai area dengan intensitas Gepeng paling tinggi yaitu Pasteur, Sukajadi, Pasirkoja, bawah Pasopati, Cikapayang, Kiaracandong, Otista, dan Laswi (Lukihardianti & Aminah, 2017). Maka dari itu, Kota Bandung sangat representatif dengan konteks penelitian karena memiliki dinamika urban yang tinggi, jumlah pemberi bantuan informal yang signifikan, serta kebijakan penertiban aktif sehingga menjadi lokasi yang ideal untuk memahami konflik antara norma sosial dan moral individu.

Meskipun praktik pemberian bantuan langsung oleh masyarakat kepada pekerja jalanan sering kali dilandasi oleh niat baik dan empati, dalam konteks sosial yang lebih luas, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang kompleks. Kegagalan regulasi dalam mengatur dan mengalihkan bantuan masyarakat ke saluran yang lebih tepat mengakibatkan munculnya efek penguatan (*reinforcement*) terhadap keberadaan pekerja jalanan. Ketika masyarakat terus memberikan bantuan secara langsung, secara tidak disadari mereka turut mempertahankan kenyamanan para pekerja jalanan untuk tetap beraktivitas di ruang publik, tanpa adanya dorongan kuat untuk beralih ke pekerjaan yang lebih stabil. Kondisi ini dapat memperpanjang

rantai kemiskinan struktural, karena kelompok rentan tersebut tidak terdorong untuk mencari alternatif pekerjaan yang lebih produktif. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menyebabkan putusannya pendidikan anak, pembentukan mentalitas ketergantungan atau budaya meminta-minta, eksploitasi anak, serta penurunan motivasi kerja di kalangan masyarakat miskin. Penanganan keberadaan pengemis dan gelandangan di Kota Bandung memerlukan pendekatan komprehensif yang memerlukan sinergi aktif antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk membangun program pemberdayaan keberlanjutan (Amelia et al., 2025).

Secara normatif, masyarakat seharusnya tidak memberikan bantuan secara langsung di jalanan karena tindakan tersebut bertentangan dengan regulasi. Oleh karena itu, idealnya bantuan disalurkan melalui lembaga resmi agar lebih efektif dan tepat sasaran. Namun secara empiris, banyak masyarakat tetap memberikan donasi di jalanan meskipun mengetahui adanya larangan tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan sosial terkait keberadaan kelompok rentan di ruang publik masih menjadi tantangan berkelanjutan bagi pemerintah daerah. Di satu sisi, masyarakat sering kali terdorong untuk menolong atau memberi bantuan kepada mereka sebagai manifestasi perilaku prososial, sementara di sisi lain terdapat kebijakan pemerintah daerah yang melarang praktik memberi kepada pengemis di jalanan guna mencegah ketergantungan. Ketegangan antara niat moral untuk menolong dan aturan hukum yang membatasi tindakan tersebut menjadi ruang menarik untuk dianalisis dalam konteks psikologi sosial, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku prososial pada masyarakat urban. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan psikologis: “Mengapa individu tetap memberi meskipun tahu dilarang secara hukum?”

Sebagai langkah awal dalam memahami fenomena perilaku prososial pada pemberi bantuan informal di jalanan, peneliti melakukan studi awal terhadap 36 responden dewasa awal di Kota Bandung. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan perilaku prososial dan faktor-faktor psikologis yang melatarbelakanginya, khususnya pada konteks pemberian bantuan langsung di ruang publik. Hasil studi awal menunjukkan data sebaran demografis responden bahwa 35 dari 36 responden pernah memberikan bantuan kepada pekerja jalanan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, dengan mayoritas responden sebanyak 26 orang (72.2%) berjenis kelamin perempuan dan memiliki tingkat pendapatan menengah ke bawah, sebagian besar berada pada kisaran Rp1.000.000 – Rp2.999.999 per bulan (52,8%). Berdasarkan frekuensi, mayoritas responden hanya memberikan bantuan 1-4 kali dalam tiga bulan terakhir, Hal ini menggambarkan adanya kecenderungan perilaku prososial yang masih kuat di tengah masyarakat urban.

Adapun bentuk bantuan yang biasanya diberikan dari pengalaman responden tertuang dalam hasil studi awal, sebanyak 27 orang (75%) sering memberikan bantuan dalam bentuk uang dan 9 orang lainnya (25%) mengasihi dalam bentuk makanan atau barang dengan berbagai momentum situasional. Dari sisi bentuk bantuan, mayoritas responden memberikan uang, dengan alasan bahwa uang lebih praktis dan fleksibel karena dapat langsung digunakan oleh penerima untuk kebutuhan yang mendesak. Sebagian lainnya memilih makanan atau barang kebutuhan sehari-hari, terutama karena dianggap lebih bermanfaat dan memastikan bantuan digunakan secara tepat.

Dari sisi motivasi, sebagian besar responden menyebutkan bahwa alasan utama mereka memberikan bantuan berkaitan dengan kepedulian emosional terhadap kondisi orang lain, seperti rasa empati, iba, dan keinginan tulus untuk meringankan beban orang lain, sementara sebagian lainnya memaknai tindakan menolong tidak hanya sebagai respons terhadap kesulitan yang dihadapi orang lain, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian dan sebagai wujud penghargaan terhadap sesama manusia yang merupakan bagian dari nilai serta prinsip hidup yang mereka anut. Temuan ini digunakan sebagai dasar untuk memahami karakteristik motivasi pemberian bantuan. Berikut adalah alasan individu dalam memberikan bantuan kepada pekerja sektor informal di jalanan, yang dikutip berdasarkan respons pada studi awal.

“Karena sesama manusia harus saling membantu.”

“Saya ingin menumbuhkan rasa empati dan semangat berbagi di lingkungan sekitar.”

“Adanya rasa empati dan tanggung jawab sosial, selain itu membantu orang lain pun tanggung jawab sebagai orang muslim sebagai aktualisasi nilai kemanusiaan.”

Selain itu, bantuan yang diberikan tidak dipahami semata sebagai tindakan memberi secara material saja, tetapi juga sebagai upaya menumbuhkan kepedulian dan sikap saling peduli, serta menjaga hubungan positif di lingkungan sekitar. Hal ini tercermin dari respons partisipan yang menggambarkan dorongan untuk menjaga keharmonisan sosial dan memperlakukan orang lain dengan perhatian serta rasa hormat, bahkan terhadap individu yang tidak dikenal.

“Membantu pekerja jalanan bagi saya bukan hanya memberi bantuan, tapi juga menularkan nilai kepedulian kepada orang lain agar lebih peka terhadap sesama.”

Secara keseluruhan, respons tersebut menunjukkan bahwa praktik pemberian bantuan sering dipahami sebagai ekspresi orientasi interpersonal yang penuh kepedulian, penghargaan terhadap orang lain, serta keyakinan akan pentingnya hubungan sosial yang harmonis, bukan sekadar respons sesaat terhadap penderitaan orang lain.

Selain dorongan emosional, ditemukan pula adanya pertimbangan moral dan rasional dalam perilaku menolong. Lebih jauh, responden juga menyoroti berbagai pertimbangan yang mereka gunakan sebelum memutuskan untuk membantu, yang mencerminkan proses penalaran moral serta penyesuaian terhadap situasi sosial. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari kutipan berikut ini.

“Pertimbangan saya biasanya melihat situasi dan kondisi, seperti apakah orang tersebut memang terlihat benar-benar membutuhkan, apakah saya sedang memiliki kemampuan untuk membantu, dan apakah situasinya memungkinkan untuk memberi bantuan dengan aman. Saya juga memperhatikan sikap atau cara mereka saat mencari nafkah di jalan. Semua itu memengaruhi keputusan saya untuk membantu atau tidak.”

Selain dari itu, seluruh responden (100%) menganggap membantu orang lain merupakan bagian dari nilai atau prinsip hidupnya. Hal ini menandakan adanya internalisasi nilai moral yang kuat dan bukan hanya tindakan sesaat, tetapi merupakan bagian dari identitas dirinya yang ingin dipertahankan, sebagaimana tercermin dalam pernyataan berikut.

“Tentu itu salah satu nilai diri, karena dengan membantu itu salah satu bentuk menjaga sifat sosial yang baik bagi diri pribadi dan terus menyebarkan kebaikan di lingkungan. Jadi kita hidup ini ada fungsi di masyarakat dan melanjutkan bentuk tatanan sosial yang baik.”

Temuan ini menunjukkan bahwa tindakan prososial responden tidak semata-mata didorong oleh dorongan emosional atau spontanitas, melainkan juga oleh pertimbangan moral dan rasional. Responden cenderung menilai situasi, kebutuhan penerima bantuan, serta kemampuan diri sebelum mengambil keputusan untuk membantu. Artinya, perilaku memberi merupakan hasil interaksi antara dorongan emosional, nilai yang diinternalisasi, penalaran sosial, dan orientasi interpersonal yang menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek afektif dan kognitif dalam perilaku prososial individu pada usia dewasa awal di Kota Bandung.

Sejumlah penelitian empiris menyoroti faktor-faktor yang mendorong perilaku prososial. Salah satu dimensi kepribadian yang konsisten dikaitkan dengan perilaku menolong adalah *agreeableness*, karakteristik yang mencakup empati, keramahan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain (Graziano et al., 2007). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tariq & Naqvi (2020) juga menunjukkan bahwa *Big Five Personality (Extraversion, Openness, Agreeableness, dan Conscientiousness)* merupakan prediktor positif perilaku prososial, dengan *agreeableness* ditemukan sebagai prediktor terkuat di antara semuanya. Selain itu, Chen & Su (2025) menyatakan bahwa *agreeableness* memiliki peranan penting untuk meningkatkan motivasi dalam kerelawanan, yang pada gilirannya akan memperkuat perilaku prososial dalam kegiatan sosial formal. Adapun menurut penelitian terdahulu di Indonesia oleh Widiastuti (2021) yang konsisten dengan temuannya menunjukkan bahwa

agreeableness yang dibersamai dengan variabel religiusitas dan usia memiliki pengaruh terhadap perilaku prososial pada remaja.

Namun demikian, meskipun perilaku prososial telah banyak dikaji, namun kajian empiris yang spesifik mengaitkan kecenderungan interpersonal yang berorientasi pada kepedulian, kehangatan, dan penghargaan terhadap orang lain sebagai faktor internal yang mempengaruhi perilaku pemberian bantuan di ruang publik masih relatif terbatas. Sejumlah penelitian banyak menempatkan perilaku prososial sebagai hasil dari faktor situasional, religiusitas, atau norma sosial. Pendekatan tersebut cenderung menekankan aspek eksternal sebagai pemicu perilaku, sementara peran karakteristik internal individu yang bersifat relatif stabil, khususnya yang merefleksikan orientasi interpersonal positif seperti kepedulian, kehangatan, dan penghargaan terhadap orang lain belum menjadi fokus utama penelitian dan belum dieksplorasi secara mendalam.

Selain itu, penelitian yang mengaitkan kecenderungan kepribadian dengan perilaku prososial umumnya dilakukan dalam konteks bantuan formal dan hubungan sosial yang relatif dekat, seperti lingkungan keluarga dan organisasi. Konteks bantuan spontan terhadap pekerja informal di jalanan, seperti situasi bantuan spontan di ruang publik yang melibatkan interaksi singkat dengan individu yang tidak dikenal, minim kedekatan sosial, serta tidak adanya kewajiban normatif untuk menolong masih jarang dikaji dalam perspektif kepribadian. Akibatnya, pemahaman mengenai peranan kecenderungan interpersonal yang bersifat stabil dalam mendorong perilaku prososial di ruang publik belum tergali secara komprehensif.

Padahal secara teoretis, *agreeableness* merefleksikan orientasi interpersonal positif yang mendorong individu untuk bersikap kooperatif, empati, dan memperhatikan kesejahteraan orang lain, sehingga berpotensi memengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dalam perilaku prososial, termasuk dalam konteks bantuan di ruang publik. Oleh karena itu, penelitian yang menguji peran *agreeableness* terhadap perilaku prososial masih diperlukan.

Sejalan dengan itu, di ranah akademik, penelitian yang dilakukan oleh Romiyati et al. (2023) pada mahasiswa memperlihatkan adanya korelasi positif antara empati dan prososialitas, semakin besar empati yang dimiliki, semakin besar pula kemungkinan seseorang dalam melakukan tindakan prososial. Sementara itu, dalam konteks organisasi relawan atau kemahasiswaan pada penelitian yang dilakukan oleh Sundari et al. (2025) mendapati faktor empati bersama dengan *gratefulness* dan *hardiness* menjelaskan sebagian besar varians perilaku prososial pada populasi mahasiswa.

Lebih jauh lagi, faktor lain seperti religiusitas juga sering dikaitkan dengan prososialitas. Dalam konteks lokal, relawan PMI di Surabaya menunjukkan bahwa *religious*

attitude berhubungan signifikan dengan prososialitas, khususnya aktivitas voluntarisme (Rahmawati & Fithri, 2020). Di samping itu, studi Kurniawan et al. (2023) menunjukkan bahwa orientasi religius secara positif mempengaruhi perilaku prososial siswa, hal ini mempertegas mengenai bagaimana nilai agama mampu menjadi pendorong moral dan sosial dalam menolong.

Dari segi konsekuensi psikologis, perilaku prososial juga memberikan pengaruh yang besar, dibuktikan dari penelitian di Bali yang menunjukkan bahwa remaja dengan perilaku prososial yang tinggi cenderung memiliki *psychological well-being* yang lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa menolong tidak menguntungkan penerima, tetapi juga memberikan dampak positif pada pemberi secara emosional dan psikologis (Megawati & Herdiyanto, 2016).

Sejumlah penelitian juga memperlihatkan bahwa *moral identity* menjadi salah satu prediktor kuat terhadap kecenderungan memberikan bantuan pada orang lain. Hal tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Li & Hu (2023) yang menyatakan bahwa dukungan sosial bisa meningkatkan perilaku prososial melalui mediasi *moral identity* dan sensitivitas moral. Sementara itu, penelitian lainnya yang diperoleh Liu et al. (2024) menjumpai bahwa *mindfulness* dapat meningkatkan perilaku prososial melalui modal psikologis dengan *moral identity* sebagai variabel moderatornya. Hal ini memperkuat posisi *moral identity* sebagai variabel psikologis yang menjadi kunci dalam konteks prososialitas.

Pendekatan dengan metode kuantitatif lainnya dilakukan oleh Arifiana et al. (2024) dari hasil temuannya didapatkan bahwa *moral identity* memediasi hubungan antara iklim sekolah dan prososialitas siswa di sekolah pada konteks pendidikan. Beberapa studi meta-analisis dan konseptual juga memperkuat fondasi atau dasar teoretis penelitian ini. Goering et al. (2024) dalam kajiannya mendapatkan bahwa *moral identity* memiliki hubungan secara konsisten dengan kesejahteraan emosional, dengan ini menandakan bahwa integrasi nilai moral ke dalam konsep diri berperan penting dalam pembentukan perilaku prososial. Sementara itu, penelitian lainnya diungkapkan oleh Sun et al. (2024) yang lebih memfokuskan pada peranan *online interpersonal trust* dan *moral identity* dalam konteks perilaku altruistik yang basisnya di dunia digital, hal ini menunjukkan bahwa *moral identity* tetap relevan, bahkan jika dilihat pada era modern.

Tidak hanya faktor internal, faktor lingkungan sosial pun memiliki peranan dalam membentuk prososialitas. Sebuah studi pada siswa menemukan bahwa kesadaran sosial yang mencakup empati, tanggung jawab moral, dan model prososial sangat mempengaruhi perilaku menolong di lingkungan sekolah (Wulandari & Satiningsih, 2018).

Di sisi lain, *moral identity* telah banyak dikaji dalam hubungannya dengan perilaku prososial, namun sebagian besar penelitian memposisikannya sebagai variabel mediator yang menjembatani pengaruh faktor lain, seperti religiusitas, empati, norma sosial, sehingga masih terbatas penelitian yang menguji sebagai prediktor secara langsung. Selain itu, kajian mengenai *moral identity* umumnya dilakukan dalam konteks hubungan sosial yang dekat. Dalam konteks tersebut, perilaku prososial sering kali tidak sepenuhnya merefleksikan dorongan internal individu, karena turut dipengaruhi oleh kewajiban sosial, pengawasan, atau norma sosial yang berlaku. Sebaliknya, konteks bantuan secara spontan di ruang publik yang menuntut individu untuk bertindak berdasarkan nilai diri tanpa adanya ikatan sosial atau tuntutan normatif yang kuat, masih jarang dikaji. Dengan demikian, masih terdapat celah penelitian dalam memahami peran *moral identity* sebagai bagian dari orientasi diri, khususnya pada konteks pemberian bantuan kepada pekerja jalanan.

Dalam penelitian ini, segmen dewasa awal (*emerging adulthood*) sangat relevan karena fase perkembangan tersebut merupakan fase transisi identitas diri dan stabilisasi nilai moral. Menurut teori perkembangan Arnett (2000), pada usia 18-25 tahun, individu tidak hanya mengalami perubahan peran sosial dan kemandirian ekonomi saja, akan tetapi menjalani fase eksplorasi nilai dan konsep diri, yang merupakan aspek krusial dalam membentuk kecenderungan prososial. Teori perkembangan memperkuat bahwa *emerging adulthood* merupakan waktu di mana *moral identity* dipertanyakan dan dikonsolidasikan terhadap diri, sekaligus menyediakan kesempatan untuk menginternalisasikan nilai moral yang berlaku secara norma sosial (Eustice-Corwin et al., 2023). Selain itu, anggota komunitas sosial dianggap penting dalam penelitian ini karena ditemukan bahwa rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama (*sense of community*) pada anggota komunitas sosial dapat memprediksi tingkat partisipasi serta tindakan prososial yang dapat menjadi modal sosial bagi anggotanya (Deng, 2022).

Meskipun penelitian mengenai perilaku prososial telah berkembang secara luas dan banyak menyoroti berbagai faktor seperti empati, dukungan sosial, serta religiusitas, sebagian besar studi sebelumnya masih berfokus pada konteks yang bersifat formal dan terstruktur, seperti kegiatan kerelawanan, interaksi digital, atau lingkungan pendidikan. Penelitian mengenai perilaku prososial dalam konteks di ruang publik yang informal, khususnya dalam praktik memberikan bantuan secara spontan kepada pekerja jalanan masih sangat terbatas. Kebanyakan penelitian perilaku prososial fokus pada kondisi netral atau situasi yang mendukung tindakan prososial, sehingga belum memberikan pemahaman yang memadai

mengenai faktor apa yang membuat seseorang tetap menolong meskipun tindakan tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan mempertimbangkan berbagai variabel yang telah diidentifikasi dalam kajian literatur dan mayoritas respons yang muncul pada studi awal, peneliti mengasumsikan dua variabel prediktor utama, yaitu *agreeableness* dan *moral identity*, karena kedua kombinasinya dapat menjelaskan mekanisme disposisional (kepribadian) dan nilai moral yang mendorong perilaku prososial. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menelaah variabel *agreeableness* ataupun *moral identity* secara terpisah, sehingga belum memunculkan gambaran komprehensif mengenai bagaimana kedua variabel psikologis tersebut bekerja secara simultan dalam mempengaruhi keputusan seseorang untuk melakukan tindakan prososial pada situasi sosial yang ambigu dan penuh dilema norma, yang mana membantu dianggap sebagai hal yang baik secara moral, tetapi melanggar aturan secara legal itu yang belum banyak diteliti. Penelitian terdahulu pun lebih banyak mengkonstruksikan *moral identity* sebagai variabel mediator yang menjembatani hubungan antara variabel psikologis lain dengan perilaku prososial. Penempatan *moral identity* sebagai mediator memperlihatkan bukti empiris mengenai pengaruh langsung terhadap perilaku prososial masih terbatas dan belum konsisten.

Dengan demikian, fenomena donatur jalanan tidak hanya memperlihatkan pelanggaran terhadap aturan formal, tetapi juga menggambarkan proses psikologis mendalam tentang bagaimana manusia menyeimbangkan nilai moral dengan norma sosial. Ketegangan antara “apa yang seharusnya dilakukan” dan “apa yang dirasakan benar” menjadi konteks penting untuk memahami perilaku prososial dalam situasi ambiguitas norma, yang menjadi dasar bagi penelitian ini.

Meskipun banyak penelitian mengasumsikan adanya hubungan positif antara *agreeableness* dan *moral identity* terhadap perilaku prososial, temuan empiris mengenai konsistensi tidak selalu seragam dalam berbagai studi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara trait *agreeableness* dan perilaku prososial dapat dipengaruhi oleh variabel lain seperti *shyness* atau interaksi sosial, sehingga efek *agreeableness* menjadi lemah atau bahkan berbeda tergantung pada konteks yang diuji (P. Sun et al., 2019). Demikian pula, riset mengenai *moral identity* memperlihatkan hasil yang beragam, meta analisis dan kajian literatur menemukan bahwa kekuatan hubungan ini bersifat sedang, tergantung pada dimensi *moral identity* yang diukur dan konteks penelitian bahkan mengindikasikan bahwa *moral identity* tidak selalu memprediksi perilaku prososial secara langsung, melainkan berperan melalui interaksi dengan variabel lainnya seperti *moral elevation* atau pengaruh situasional (Winterich et al., 2013). Selanjutnya, bukti lain menunjukkan bahwa pengaruh *agreeableness*

terhadap perilaku prososial dapat dimediasi oleh variabel lain seperti *prosocial knowledge*, yang memperlihatkan bahwa hubungan ini tidak selalu langsung (Martin-raugh et al., 2016).

Kekosongan ini menunjukkan adanya aspek yang belum banyak dijelaskan, baik dari segi konteks yaitu ruang publik dan donatur jalanan, segi populasi yaitu usia dewasa awal di kawasan urban, maupun integrasi variabel secara simultan dalam satu model prediktif. Padahal, fenomena menolong di jalanan seringkali melibatkan pergulatan antara empati, iba, norma moral, norma sosial, serta larangan regulatif, sehingga dengan hal ini diperlukan pendekatan penelitian yang lebih mendalam dan relevan dengan dinamika sosial perkotaan.

Berangkat dari celah kekosongan tersebut, penelitian ini menawarkan pembaharuan melalui tiga aspek penting. Pertama, penelitian ini mengintegrasikan variabel psikologis *agreeableness* dan *moral identity* secara simultan untuk memprediksi kecenderungan perilaku prososial, berbeda dengan berbagai penelitian sebelumnya yang menguji kedua variabel tersebut secara terpisah. Kedua, penelitian ini memiliki fokus pada konteks perilaku prososial yang bersifat informal di ruang publik, yaitu pemberian donasi yang diberikan langsung kepada pekerja jalanan oleh para pemberi bantuan informal di jalanan. Konteks ini jarang diteliti namun memiliki implikasi sosial yang signifikan terhadap segala sektor kehidupan, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat. Ketiga, penelitian ini menitikberatkan pada populasi dewasa awal di Kota Bandung, di mana merupakan kelompok yang sedang membentuk identitas moral dan identitas sosial, namun hidup dalam lingkungan urban yang terbilang kompleks.

Dengan demikian, penelitian berjudul “*Pengaruh Agreeableness dan Moral Identity terhadap Perilaku Prososial pada Pemberi Bantuan Informal Dewasa Awal di Kota Bandung*” tidak hanya mengisi kekosongan penelitian terdahulu, namun dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori psikologi sosial dan bagi praktik sosial masyarakat di wilayah Kota Bandung. Penelitian ini penting dilakukan untuk menjembatani kesenjangan antara idealitas moral dan realitas sosial serta diharapkan tidak hanya berkontribusi pada penguatan teori psikologi sosial saja, tetapi juga turut membangun budaya menolong yang berkeadaban yakni perilaku prososial yang tumbuh dari empati, dikendalikan oleh nilai moral, dan terarah pada kebaikan sosial yang berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Apakah *agreeableness* dan *moral identity* secara simultan berpengaruh terhadap perilaku prososial pada pemberi bantuan informal dewasa awal di Kota Bandung?
2. Apakah *agreeableness* berpengaruh terhadap perilaku prososial pada pemberi bantuan informal dewasa awal di Kota Bandung?

3. Apakah *moral identity* berpengaruh terhadap perilaku prososial pada pemberi bantuan informal dewasa awal di Kota Bandung?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh *agreeableness* dan *moral identity* secara simultan terhadap perilaku prososial pada pemberi bantuan informal dewasa awal di Kota Bandung.
2. Menganalisis pengaruh *agreeableness* terhadap perilaku prososial pada pemberi bantuan informal dewasa awal di Kota Bandung.
3. Menganalisis pengaruh *moral identity* terhadap perilaku prososial pada pemberi bantuan informal dewasa awal di Kota Bandung.

Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan penguatan empiris terhadap teori kepribadian, khususnya dimensi *agreeableness* dalam kerangka *Big Five Personality Traits*, serta memperluas penerapan teori *moral identity* dalam konteks sosial yang kompleks dan sarat ambiguitas norma, yaitu ketika norma moral berhadapan dengan regulasi mengenai larangan aktivitas gelandangan dan pengemis. Penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan kajian perilaku prososial di ruang publik, khususnya di wilayah urban yang selama ini banyak dikaji dalam konteks formal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji hubungan antarvariabel, tetapi juga mengintegrasikan dua pendekatan utama dalam psikologi yaitu faktor kepribadian dan nilai moral dalam satu kerangka empiris perilaku prososial di wilayah urban.

Selain itu, pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif, karena tidak hanya menilai intensitas perilaku menolong, namun memperluas kajian prososialitas dari konteks formal menjadi konteks sosial informal yang penuh dilema norma. Lebih lanjut, diharapkan dapat menghadirkan model kuantitatif yang dapat di replikasi pada kota besar lain dengan karakteristik kebijakan ruang publik yang serupa, sehingga memperkaya kajian lintas wilayah dan lintas konteks mengenai perilaku prososial masyarakat perkotaan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan bagi Pemerintah Kota Bandung sebagai rujukan dalam merancang edukasi publik dan kanal donasi terarah, sehingga warga tetap dapat menolong orang lain tanpa melanggar ketertiban ruang publik.

- b. Bagi lembaga filantropi, LSM, dan komunitas sosial, penelitian ini dapat menjadi acuan untuk menyusun strategi kampanye dan program bantuan yang sesuai dengan profil psikologis dewasa awal, sehingga penyaluran bantuan berlangsung lebih etis, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
- c. Bagi institusi pendidikan dan kampus, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan program penguatan karakter dan pelatihan empati yang mendorong perilaku prososial secara terstruktur dan berkesinambungan.
- d. Bagi masyarakat umum, khususnya pemberi bantuan, penelitian ini memberikan literasi mengenai etika dan resiko dalam memberi bantuan di jalanan, serta memperkenalkan alternatif saluran donasi yang aman, terarah, dan tetap menjaga martabat penerima manfaat.

